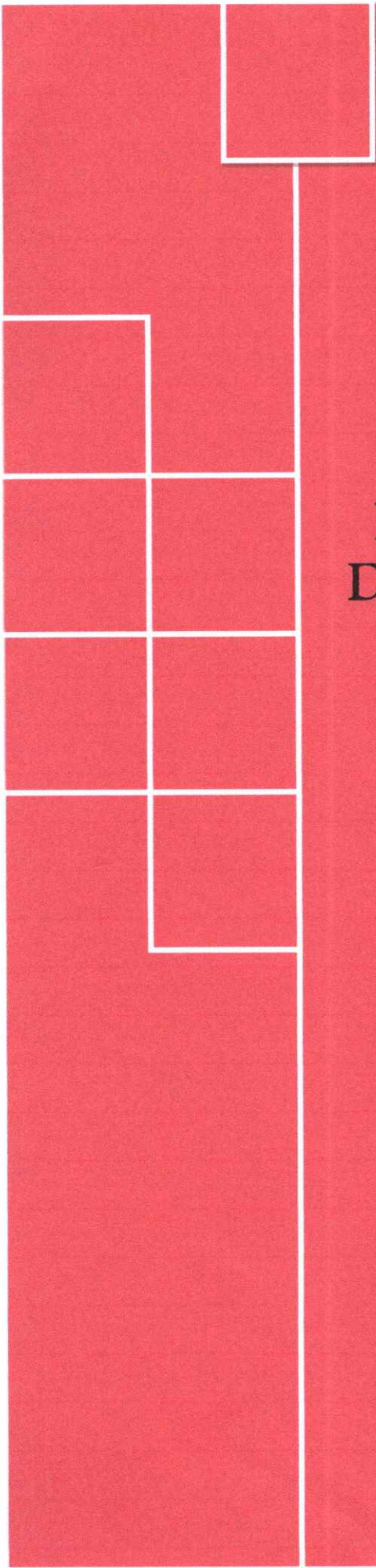




RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN (DPKPP)
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja SKPD merupakan Dokumen Perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur selama satu tahun anggaran.

Rencana Kerja (Renja) DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan operasional tahun ke-3 (ketiga) Renstra DPKPP Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2024, yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Renja DPKPP Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 DPKPP Kabupaten Luwu Timur ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparaturnya DPKPP, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Malili, 23 Mei 2023

KEPALA DPKPP



ANDI WIHA HASAN, ST
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197403232003121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKPP Kab. Luwu Timur	22
Tabel 2.4	T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kab. Luwu Timur	27
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran Renja DPKPP Tahun 2024	38
Tabel 3.2	Sasaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan DPKPP Kab. Luwu Timur Tahun 2024	39
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif DPKPP Kab. Luwu Timur Tahun 2024	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun dokumen Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja OPD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal : Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :
 - a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan : penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Perangkat Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/Lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas : Perangkat Daerah forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir : Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjabarkan rencana kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan,

kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudin disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bapelitbangda Kab. Luwu Timur untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Instruksi Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112)
 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B.HK.11.111.21);
23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur;
24. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.
26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 nomor 86);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Perubahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan program dan kegiatan rencana strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu timur jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2024;
2. Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBD-P, KUA PPAS-P, RKA-P DPKPP Tahun Anggaran 2024

3. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPKPP Kabupaten Luwu Timur dalam pembangunan daerah;
4. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
5. Menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
7. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2024

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi DPKPP di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur;
3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan DPKPP
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi urusan masing-masing bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Landasan Hukum
1. 3 Maksud dan Tujuan
1. 4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah berisi tentang :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra/Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah berisi Uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi tentang :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan uraian mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

4. 1 Catatan Ketersediaan Anggaran

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan Tahun Anggaran 2024, DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah wajib melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2022 dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

I. Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 Subkegiatan yaitu :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Subkegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana adalah pembangunan rumah bagi korban yang terkena bencana di desa Laskap Kecamatan Malili, kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi terkait data bencana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD. Triwulan II tidak ada target pada indikator tersebut. Setelah menindaklanjuti

kegiatan tersebut dengan melakukan inventarisasi data, rumah korban bencana tersebut tidak dapat dikategorikan status Bencana karena tidak menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional, sehingga anggaran pada subkegiatan tersebut dikeluarkan, pada APBD perubahan Tahun 2024.

2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Subkegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus adalah jumlah rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Yang dibangun yaitu rehabilitasi rumah susun sederhana sewa Sumasang. Pada kegiatan pemeliharaan rusunawa terdapat pekerjaan perbaikan atap dan platfon.
 3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi rekomendasi perizinan perumahan yang ditargetkan 50% terealisasi sebesar 50%, kegiatan ini dilaksanakan jika ada permohonan rekomendasi untuk peninjauan lapangan rencana pembangunan perumahan se-Kabupaten Luwu Timur. Tetapi kegiatan yang tidak dapat berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya personil SDM yang ada pada seksi yang menangani kegiatan ini.
- II. Program Kawasan Permukiman** didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 Subkegiatan yaitu :
1. Kegiatan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Subkegiatan Penyusunan dan atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terdiri dari dua indikator yaitu jumlah aplikasi yang dikembangkan dan jumlah dokumen RP3KP. Jumlah aplikasi yang disusun merupakan pemutakhiran/update database berupa penyajian data berbasis spasial, yang terdiri dari sarana dan prasarana yang merupakan kewenangan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur,

yang telah dibuat pada tahun anggaran 2019, target pada kegiatan ini 1 dan terealisasi 1 aplikasi. Salah satu belum maksimalnya kegiatan ini karena tidak adanya SDM yang menguasai aplikasi ini pada bidang terkait, selain itu tidak adanya pelaksana setiap kegiatan Fisik menyerahkan data koordinat dan tracking *Global Positioning System* (GPS) dan Foto Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang terbangun perlu Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan untuk jumlah dokumen RP3KP merupakan lanjutan untuk pembuatan Peraturan Daerah, ditargetkan 1 tidak ada realisasi kinerja pada indikator tersebut. Dikarenakan perencanaan yang akan dilaksanakan yaitu pembuatan perda tetapi setelah melaksanakan konsultasi, perlu dilakukan review kembali untuk dokumen RP3KP.

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, Subkegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni terdiri dari dua indikator yaitu jumlah bantuan perumahan yang bersifat pendampingan untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dananya bersumber dari APBN, yang memiliki tenaga fasilitator lapangan (TFL) tersendiri yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Selain BSPS ditargetkan juga untuk Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) dengan menggunakan APBD. Pada triwulan ini dilaksanakan identifikasi untuk penyiapan data bantuan bedah rumah tingkat kelurahan. Kendala pelaksanaan ini adalah kurangnya SDM dan tidak tersedianya data base terkait Masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan bedah rumah yang telah tervalidasi pada tahun sebelumnya.

III. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 Subkegiatan yaitu :

Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap

prasarana, sarana dan utilitas dasar yang memadai. Sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum PSU. Indikator, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan formulasi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100. Target triwulan II adalah 25% dan realisasi hanya 15%, sehingga capaian hanya 60%. Pada tahun 2024, Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

i. **Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** adalah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di lingkungan perumahan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 15% dengan capaian 60%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan II. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana, sarana dan utilitas yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan ***Detail Engineering Design***, pembangunan dan pengawasan. Indikator Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU. . Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 15% dengan capaian 60%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV. Berikut tabel capaian program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Untuk mencapai indikator cakupan layanan pertanahan, dicapai dengan memperhitungkan total persentase seluruh program/jumlah seluruh program x 100. Untuk capaian sasaran strategis **Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Umum**. Didukung beberapa program, kegiatan dan subkegiatan. program yang dilaksanakan dalam memenuhi tercapainya sasaran tersebut meliputi:

Adapun program dan kegiatan untuk memenuhi tercapainya sasaran 2 meliputi :

1. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**, bertujuan untuk anggarannya bersifat disediakan dan dilaksanakan sesuai dengan laporan yang diterima terkait permasalahan tanah aset Pemda Kabupaten Luwu Timur. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini anggarannya bersifat disediakan dan dilaksanakan sesuai dengan laporan yang diterima terkait permasalahan tanah aset Pemda Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2024 di targetkan 1 kasus, ada 1 kasus yang dilaporkan sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Permasalahan yang ada pada kegiatan ini kurangnya personil

🚧 **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**

Program ini dirancang oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah pendataan, inventarisasi, konsultasi publik, negosiasi dan kesepakatan, pembayaran ganti kerugian, relokasi dan santunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator Persentase luas lahan yang dibebaskan, dengan formulasi luas lahan yang dibebaskan pada tahun n dibagi luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk program ini ditargetkan pada triwulan IV, sehingga belum ada capaian kinerja. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, didukung 1 kegiatan :

- i. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan sebagai fasilitasi pembebasan tanah. Indikator luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pertaahun pada tahun n (m2). Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan :

1. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu), aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang membutuhkan tanah dengan pelaksanaan perencanaan dengan appraisal untuk menentukan harga tanah. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pelaksanaan identifikasi pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Desa Wewangriu Kecamatan Malili, yang sementara proses kelengkapan administrasi yaitu nota dinas persetujuan pengadaan tanah dari Dinas PUPR, sebagai instansi yang memerlukan tanah, rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah lokasi pengadaan, fotocopy KTP dan alas hak para pemilik lahan rencana lokasi pengadaan tanah (SKT/PBB/sertifikat) dan peta bidang tanah hasil pengukuran oleh kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur.

Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah, indikator persentase izin lokasi, formulasi jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan III. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, adalah izin yang diberikan untuk penentuan lokasi tanah aset Pemda yang akan dimanfaatkan. Indikator, jumlah dokumen kegiatan Pengendalian pemanfaatan. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan III. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,

Subkegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan fasilitasi penentuan lokasi dengan penetapan surat keputusan Bupati untuk tanah aset pemda yang akan dimanfaatkan. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan II, sehingga pada triwulan II, ada capaian 1 Surat Keputusan terkait pengadaan tanah RTH Wewangriu.

✚ **Program Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penatagunaan tanah. Indikator, persentase luas lahan bersertifikat, dengan formulasi luas lahan bersertifikat dibagi luas wilayah seluruh Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Untuk kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, merujuk pada aktivitas pemanfaatan lahan atau tanah yang seluruh wilayahnya terletak dalam batas administrative Kabupaten. Indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah fasilitasi persertifikatan aset Pemerintah Daerah, indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Sementara proses pengurusan administrasi sertifikat Lokasi Sumasang dengan luas $\pm 2,9$ Ha yang tercatat pada Kartu Inventarisasi Barang, yang direncanakan akan disertifikatan 1,4 Ha, namun lahan tersebut telah dikelola oleh masyarakat disekitar untuk lokasi kebun, kegiatan ini masih sementara proses.

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- ✚ Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan tanah;
- ✚ Minimnya kualitas SDM pertanahan;
- ✚ Kurang optimalnya dokumentasi administrasi tanah.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Melakukan sosialisasi melalui media social dan melalui papan informasi publik;
- ✚ Memaksimalkan koordinasi lintas perangkat daerah, maupun instansi vertical Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian pelayanan pertanahan.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- ✚ Penggunaan dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan persertifikatan aset Desa;
- ✚ Efisiensi anggaran yaitu persertifikatan tanah warga dan tanah rumah ibadah, dimasukkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan pembebasan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan syarat untuk persertifikatan gratis.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang Infrastruktur Perumahan, Sarana Prasarana Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perumahan, Sarana Prasarana Kawasan Permukiman dan Pertanahan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja Dinas berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam IKK maupun SPM.

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

Capaian SPM pada tahun 2023 untuk kabupaten Luwu Timur adalah 100%. Pada tahun 2023 tidak ada status bencana dan tidak ada relokasi program Pemerintah. Pada Renstra DPKPP Tahun 2021-2026, telah disusun program, kegiatan dan subkegiatan dan ketersediaan anggaran untuk mendukung pemenuhan SPM urusan Perumahan Rakyat. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam pemenuhan SPM di bidang Perumahan Rakyat.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

Berikut Tabel Capaian Kinerja Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Standar Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur :

Tabel 2.1
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKPP Kab. Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-						Ralisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)		-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	0	0	0	100	100	100
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)		-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	0	0	0	100	100	100
3.	Rasio Rumah Layak Huni		82,98	83,56	84,14	84,72	85,3	85,88	0,168	0,168	0,169	0,174	0,177	0,183						
4.	Rasio Permukiman layak huni		86,7	86,92	87,14	87,36	87,59	87,81	0,719	0,75	0,75	0,75	0,757	0,934						
5.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		82,26	82,31	82,37	82,42	82,47	81,17	81,69	80,81	82,46	84,56	86,65	87,5	99,31	98,18	100,11	102,60	105,07	107,80

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-						Ralisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.	Cakupan layanan rumah rumah layak huni yang terjangkau		47,43	48,52	49,9	50,92	51,82	52,41	47,91	48,52	51,71	54,92	58,12	66,45	101,01	100,00	103,63	107,86	112,16	126,79
7.	Persentase permukiman yang tertata		80	74,95	84	86	88	88	71,94	74,95	74,98	74,98	75,74	93,37	89,93	100,00	89,26	87,19	86,07	106,10
8.	Persentase lingkungan permukiman kumuh		1,16	0,01	1,13	1,11	1,1	1,1	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04	0,04	0,86	100,00	1,77	3,60	3,64	3,64
9.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		10	5,21	8	7	7	7	5,02	5,21	5,22	2,24	2,24	0,074	50,20	100,00	65,25	32,00	32,00	1,06
10.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		19,93	19,19	16,36	14,69	13,1	11,57	18,31	19,19	16,41	15,05	13,35	12,5	91,87	100,00	100,31	102,45	101,91	108,04
11.	Cakupan Lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		50	46,46	60	65	70	70	44,88	46,46	53,54	59,06	67,72	70,08	89,76	100,00	89,23	90,86	96,74	100,11
12.	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman		26,38	26,43	26,87	27,02	27,59	27,59	n.a	52,3	52,81	53,44	53,29	58,94	n.a	197,88	196,54	197,78	193,15	213,63
13.	Cakupan layanan pertanahan		n.a	48,75	51,23	52,95	53,29	53,29	n.a	37,65	38,28	38,29	39,65	41,56	n.a	77,23	74,72	72,31	74,40	77,99
14.	Jumlah nilai LAKIP		40,05	40,1	50,05	50,1	65,05	65,05	-	4	82,97	69,75								

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur (DPKPP), telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Luwu Timur.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mewujudkan target kinerja menghadapi beberapa permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya data dan informasi di bidang perumahan;
2. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata;
3. Masih tingginya luasan permukiman kumuh;
4. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman;
5. Belum optimalnya pemenuhan layanan prasarana dan sarana utilitas;
6. Proses penerbitan sertifikat tanah aset daerah seringkali terjadi keterlambatan akibat dari kurangnya SDM/personil yang menangani kegiatan tersebut dan keterlambatan proses pendaftaran sertifikat di BPN seringkali terjadi karena yang diprioritaskan adalah kegiatan program nasional (terkendala SDM tenaga juru ukur);
7. Pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan, karena terbatasnya melakukan rapat-rapat untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah yang di dalamnya terdapat pengembangan perumahan dan permukiman dan memberikan legalitas terhadap status tanah aset Pemda, fasilitasi sertifikat rumah ibadah dan tanah milik warga, melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melaksanakan update data terkait data perumahan dan kawasan permukiman);
2. Mengoptimalkan penanganan perumahan dan permukiman pada kawasan kumuh;
3. Melaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah aset pemda yang diperoleh dari ganti rugi lahan maupun hibah dari masyarakat untuk bukti legalitas penguasaan tanah pemda;
4. Melaksanakan pemasangan patok batas tanah aset pemda dan papan bicara diatas lahan yang belum dimanfaatkan oleh Pemda yang sudah memiliki legalitas hak atas tanah tersebut;
5. Melakukan mediasi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, untuk penyelesaian permasalahan tanah;
6. Menerbitkan Surat Keputusan ijin lokasi terhadap pemanfaatan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan instansi terkait yang membutuhkan lahan.

Tantangan dan Peluang yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

➤ Tantangan

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
2. Kurangnya koordinasi antara instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam hal pemanfaatan tanah asset Pemda untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana Pemerintahan, sehingga seringkali terjadi permasalahan/konflik status tanah yang telah dimanfaatkan oleh instansi terkait

➤ Peluang

1. Memberi peluang dalam melakukan perbaikan database khususnya untuk data terkait perumahan dan permukiman kawasan kumuh;
2. Meningkatkan peran dari semua pihak mulai dari kabupaten, kecamatan hingga aparat desa dalam penanganan di bidang perumahan;
3. Melakukan inovasi dalam efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat yang akan dicapai;
4. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan OPD terkait, Lembaga vertikal dan beberapa stakeholder yang mempunyai arah kebijakan yang sama dan saling mendukung;

5. Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan tanah terkait dengan pengamanan tanah aset pemda

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut beberapa Review terkait Rancangan Awal RKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Yang dijabarkan dalam beberapa point penting, yaitu :

- a. Tahapan Perencanaan Renja OPD tetap mengacu kepada Permendagri 86 Tahun 2017 namun sesungguhnya tetap melakukan penyesuaian terhadap mekanisme yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri no 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatTahapan Penyusunan Renja perangkat daerah 2024 mengakomodir program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat di Desa yang terkait langsung dengan penyediaan sarana prasarana infrastruktur, maupun berdasarkan hasil pengumpulan data teknis dari investigasi lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Perlu dilakukan penguatan terhadap dokumen persiapan (perencanaan) yang menjadi syarat administrasi dan teknis utamanya yang menjadi program prioritas Kabupaten. Kewenangan pada DPKPP untuk Kawasan permukiman pada Kawasan kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 169/D-06/IV/Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Penyediaan Sarana Prasarana Utilitas Perumahan, Pengembangan Perumahan yang merupakan program yang mendukung SPM urusan perumahan, dan urusan terkait pelayanan pertanahan. Untuk usulan pada SIPD , tidak ada usulan yang diteruskan, sehingga untuk table T.C-32 kosong,

Tabel 2.5

Tabel 2.4

Tabel T.C-32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur

Dinas Peumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	DESA	KECAMATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Apala Desa Balo-Balo Kec. Wotu	1	Kegiatan	Balo-Balo	Wotu	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni	1	Kegiatan	Beringin Jaya	Tomoni	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
3	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lakawali Kec. Malili	1	Kegiatan	Lakawali	Malili	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
4	Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Podomoro-Podomakmur Desa Lakawali Kec. Malili	1	Kegiatan	Lakawali	Malili	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
5	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Lr. 1 Barat Dusun Podomoro Desa Lakawali	1	Kegiatan	Lakawali	Malili	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
6	Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Balantang Kec. Malili	1	Kegiatan	Balantang	Malili	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
7	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dusun Paorebbae Desa Wewangriu Kec. Malili	1	Kegiatan	Wewangriu	Malili	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
8	Pemeliharaan Drainase Kompleks Kantor Camat Burau	1	Kegiatan	Burau	Burau	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	DESA	KECAMATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
10	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Praya Desa Benteng Kec. Burau	1	Kegiatan	Benteng	Burau	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
11	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bonepute Kec. Burau	1	Kegiatan	Bonepute	Burau	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
12	Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Bone Pute 2 Desa Bone Pute Kec. Burau	1	Kegiatan	Bonepute	Burau	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
13	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lambara Harapan Desa Laro Kec. Burau	1	Kegiatan	Laro	Burau	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
14	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lera Kec. Wotu	1	Kegiatan	Lera	Wotu	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
15	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Cendana Hijau Desa Lera Kec. Wotu	1	Kegiatan	Lera	Wotu	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	DESA	KECAMATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
16	Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Mertabuana Desa Pepuro Barat Kec. Wotu	1	Kegiatan	Pepuro Barat	Wotu	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
17	Pembangunan Drainase Lingkungan Depan SD Desa Rinjani Kec. Wotu	1	Kegiatan	Rinjani	Wotu	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
18	Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Marampa Desa Rante Mario Kec. Tomoni	1	Kegiatan	Rante Mario	Tomoni	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
19	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Sindu Agung Kec. Mangkutana	1	Kegiatan	Sindu Agung	Mangkutana	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
20	Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Sindu Binangun Desa Sindu Agung Kec. Mangkutana	1	Kegiatan	Sindu Agung	Mangkutana	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
21	Pembangunan Drainase Dusun Sindumartani Desa Sindu Agung Kec. Mangkutana	1	Kegiatan	Sindu Agung	Mangkutana	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	DESA	KECAMATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
22	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Kencana Desa Margolembo Kec.Mangkutana	1	Kegiatan	Margolembo	Mangkutana	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
23	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nanggh Dusun Tongkomaino Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana	1	Kegiatan	Kasintuwu	Mangkutana	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
24	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Sumber Agung Kec. Kalaena	1	Kegiatan	Sumber Agung	Kalaena	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
25	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Lr. 11 Desa Taripa Kec. Angkona	1	Kegiatan	Taripa	Angkona	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
26	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Leci Dusun Nusa Indah Desa Balirejo Kec. Angkona	1	Kegiatan	Balirejo	Angkona	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
27	Pemeliharaan Drainase Lingkungan Dusun Lembah Desa Tarabbi Kec. Malili	1	Kegiatan	Tarabbi	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	DESA	KECAMATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
28	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tarabbi Kec. Malili	1	Kegiatan	Tarabbi	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
29	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Dandawasu 1 Desa Tarabbi Kec. Malili	1	Kegiatan	Tarabbi	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
30	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Mallaulu Desa Puncak Indah Kec. Malili	1	Kegiatan	Puncak Indah	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
31	Pembangunan Drainase Lingkungan Lr. 3 ke Lr. 4 Desa Puncak Indah Kec. Malili	1	Kegiatan	Puncak Indah	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
32	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Lr. 4 Dusun Mallaulu Desa Puncak Indah Kec. Malili	1	Kegiatan	Puncak Indah	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
33	Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. 4 Ke Lr. 5 Desa Puncak Indah Kec. Malili	1	Kegiatan	Puncak Indah	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	DESA	KECAMATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
34	Peningkatan Jalan Lingkungan Lr. 5 ke Lr. 6 Desa Puncak Indah Kec. Malili	1	Kegiatan	Puncak Indah	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
35	Lanjutan Pembangunan Drainase Perumahan PNS Desa Puncak Indah Kec. Malili	1	Kegiatan	Puncak Indah	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
36	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Desa Puncak Indah Kec. Malili	1	Kegiatan	Puncak Indah	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
37	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Waru Kelurahan Malili Kec. Malili	1	Kegiatan	Puncak Indah	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
38	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Jl. By Pass Dusun Lagaroang Desa Baruga Kec. Malili	1	Kegiatan	Baruga	Malili	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
39	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Samudera Kelurahan Malili Kec. Malili	1	Kegiatan	Malili	Malili	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	DESA	KECAMATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
40	Pembangunan Plat Duicker Dusun Birono Jaya Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	1	Kegiatan	Parumpanai	Wasuponda	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
41	Pembangunan Drainase Lingkungan Lr. 7A Dusun Mawar Desa Wanasari Kec. Angkona	1	Kegiatan	Wanasari	Angkona	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
42	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Wawomeusa Desa Wawondula Kec. Towuti	1	Kegiatan	Wawondula	Towuti	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
43	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lewehungko Desa Langkea Raya Kec. Towuti	1	Kegiatan	Langkea Raya	Towuti	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
44	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Sora Desa Lioka Kec. Towuti	1	Kegiatan	Lioka	Towuti	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
45	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Matompi Kec. Towuti	1	Kegiatan	Matompi	Towuti	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	DESA	KECAMATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
46	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Cendrawasih Desa Matompi Kec. Towuti	1	Kegiatan	Matompi	Towuti	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
47	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dusun Rappang Desa Mahalona Kec. Towuti	1	Kegiatan	Mahalona	Towuti	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Isu strategis penyelenggaraan kawasan permukiman: a. Masih terdapat 61,7 persen rumah tangga yang menempati hunian tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh. b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh. c. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak (57,70 persen), dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal. d. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral, antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang. e. Perlunya sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, f. Belum terdapat referensi dokumen perencanaan sektoral tunggal. Untuk bidang perumahan dan permukiman, terdapat Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP), dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Dokumen perencanaan yang telah disusun perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat). Masih rendahnya peran Pemerintah Daerah dalam penanganan permukiman kumuh. Isu strategis penyediaan perumahan: a. 61,7% rumah tangga di Indonesia masih menghuni rumah tidak layak huni b. Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak huni di perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin

dominannya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan. c.Urban Sprawl karena pembangunan rumah yang cenderung menyebar ke kawasan peri urban/perdesaan; d.Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang teintegrasi dengan sistem perkotaan; e.Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan rumah sewa untuk kelompok MBR (social rental housing) dan rumah singgah (social housing) bagi masyarakat miskin/homeless; f.Rencana pemindahan ibukota negara dan pengembangan wilayah strategis yang berimplikasi pada kebutuhan penyediaan rumah baru; g.Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh; h.Terdapatnya regulasi terkait penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan lengkap; i.Perlu dilakukan perbaikan delivery system penyediaan rumah layak huni, dimulai dari pengadaan tanah, perizinan, pembangunan, pemanfaatan inovasi teknologi serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan resiko bencana, mengakomodasi desain tradisional setempat dan budaya bermukim masyarakat adat, hingga peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan perumahan; j. Belum adanya kebijakan terkait rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 (satu) keluarga secara bersama (co-housing) untuk efisiensi pemanfaatan lahan.

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development yang selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Indikator yang akan dicapai SPM Bidang Perumahan yaitu Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategi untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DPKPP Kabupaten Luwu Timur menjalankan visi dan misi yang dijawantahkan melalui tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahunan yaitu :

1. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan kawasan permukiman dan pertanahan.

Tujuan dan sasaran Renja DPKPP Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPKPP TAHUN 2024

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET 2023
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	<i>Persentase Pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</i>	42,99 %
	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah</i>	100 %
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah</i>	6,23 %
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani</i>	43,88 %
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah</i>	95 %
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Predikat Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	BB
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,80

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

TABEL 3.2
SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DPKPP
TAHUN 2024

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program KabupatenKota
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus
	2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota
	2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
	2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
	2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah sepuluh Ha
	Penyusunan Rencana Tapak Site Plan dan Detail Engineering Design DED Peremajaan Pemugaran Permukiman Kumuh

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Perumahan Permukiman Kumuh
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU
	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah KabupatenKota
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah KabupatenKota
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam satu Daerah KabupatenKota
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
	2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
	2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah KabupatenKota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah KabupatenKota
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA
	2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran SKPD
	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
	Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 melaksanakan 9 program dan 21 kegiatan dan 42 subkegiatan dengan pagu anggaran sesuai rancangan awal sebesar Rp. 23.085.801.125,-

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur direncanakan melaksanakan 9 program dan 21 kegiatan dan 42 subkegiatan dengan pagu anggaran Rp. 23.085.801.700,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

TABEL 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Indikatif
DPKPP Kab. Luwu Timur Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.060.801.700,00					36.081.265.801,00
	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						16.785.487.800,00					35.253.765.801,00
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %			100 %	4.537.241.450,00				100 %	6.457.091.301,00
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 dokumen			17 dokumen	114.452.700,00			PNS DPKPP	17 dokumen	116.200.000,00
	1.04.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	47.113.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	3 Dokumen	37.500.000,00
	1.04.01. 2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	2 Dokumen	6.250.000,00
	1.04.01. 2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	2 Dokumen	4.031.250,00
	1.04.01. 2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	57.339.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	10 Laporan	68.418.750,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 %	3.066.243.250,00			PNS DPKPP	100 persen	3.808.512.365,00
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan			20 Orang/bulan	2.991.809.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	PNS DPKPP	22 Orang/bulan	3.739.274.865,00
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	74.433.750,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	PNS DPKPP	18 Laporan	69.237.500,00
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang	100 persen			100 %	19.065.000,00			PNS DPKPP	100 persen	23.837.500,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>ditatausahakan</i>										
	1.04.01. 2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan			4 Laporan	19.065.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	4 Laporan	23.837.500,00
	1.04.01. 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah realisasi PAD Perangkat Daerah</i>	5000000 rup iah			5000000 Rp	6.119.600,00			Masyarakat Kab. Luwu Timur	5000000 rup iah	9.749.725,00
	1.04.01. 2.04.00 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	4 Dokumen			4 Dokumen	6.119.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	9.749.725,00
	1.04.01. 2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	<i>Persentase rata- rata capaian kinerja administrasi kepengawasan perangkat daerah</i>	100 persen			100 %	150.802.500,00			PNS DPKPP	100 persen	324.950.625,0 0
	1.04.01. 2.05.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02												
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	55 Paket			0 Paket	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	55 Paket	32.000.000,00
	1.04.01. 2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	34.272.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	12 Dokumen	50.375.625,00
	1.04.01. 2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	22 Orang			20 Orang	116.530.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	22 Orang	242.575.000,00
	1.04.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata- rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 %	447.907.300,00			PNS DPKPP	100 persen	636.498.500,00
	1.04.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3 Paket			4 Paket	4.634.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	3 Paket	5.792.500,00
	1.04.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	27.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	3 Paket	45.000.000,00
	1.04.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	17.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	1 Paket	5.000.000,00
	1.04.01. 2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket			20 Paket	12.628.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	20 Paket	16.475.000,00
	1.04.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	18.720.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	3 Paket	18.675.000,00
	1.04.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	72 Dokumen			72 Dokumen	13.920.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	72 Dokumen	18.675.000,00
	1.04.01. 2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	21.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	12 Laporan	25.937.500,00
	1.04.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			0 Laporan	332.854.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	12 Laporan	500.943.500,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.04.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	25 unit			29 unit	231.500.000,00			PNS DPKPP	25 unit	139.000.000,00
	1.04.01. 2.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			2 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	1 Unit	80.000.000,00
	1.04.01. 2.07.00 05	Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit			21 Unit	4.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	1 Unit	56.500.000,00
	1.04.01. 2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			45 Unit	227.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	1 Unit	2.500.000,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja/ penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 %	200.161.100,00			PNS DPKPP	100 persen	243.518.400,00
	1.04.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			4 Laporan	12.696.100,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	4 Laporan	15.268.400,00
	1.04.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	84.865.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	3 Laporan	85.000.000,00
	1.04.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			9 Laporan	102.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	4 Laporan	143.250.000,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.04.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	87 unit			81 unit	300.990.000,00			PNS DPKPP	87 unit	1.154.824.186 ,00
	1.04.01. 2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			13 Unit	57.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	2 Unit	76.062.093,00
	1.04.01. 2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit			67 Unit	43.190.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	66 Unit	78.762.093,00
	1.04.01. 2.09.00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	2 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	PNS DPKPP	2 Unit	1.000.000.000 ,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ilitasi										
2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	100 %			100 %	2.240.187.000,00				100 %	728.163.125,0 0
	1.04.02. 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta Jumlah dokumen Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	2 dokumen			2 Dokumen 100 %	511.813.000,00			Masyarakat Kab.Luwu Timur	2 dokumen	57.157.500,00
	1.04.02. 2.01.00 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus											

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				4			1 Dokumen	18.800.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	23.500.625,00
	1.04.02.2.01.00 09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4 Dokumen									
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	493.012.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	33.656.875,00
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang direhabilitasi dan dibangun	100 Persen			100 %	1.100.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu Timur	100 Persen	268.750.000,00
	1.04.02.2.03.00 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana											
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	3 Unit Rumah			10 Unit Rumah	200.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	3 Unit Rumah	56.250.000,00
	1.04.02.2.03.00 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana											

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah			20 Unit Rumah	400.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	3 Unit Rumah	106.250.000,0 0
	1.04.02. 2.03.00 12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3 Unit Rumah			50 Unit Rumah	500.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	3 Unit Rumah	106.250.000,0 0
	1.04.02. 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola	100 Persen			100 %	583.880.000,00			Masyarakat Kab. Luwu Timur	100 Persen	336.413.750,0 0
	1.04.02. 2.05.00 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	8 Dokumen			3 Dokumen	583.880.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	8 Dokumen	336.413.750,0 0
	1.04.02. 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah permohonan perizinan pengembangan perumahan	3 rekomend asi			3 rekomedasi	44.494.000,00			Masyarakat Kab. Luwu Timur	3 rekomend asi	65.841.875,00
	1.04.02. 2.06.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan											

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	03												
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan			4 Laporan	44.494.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	3 Laporan	65.841.875,00
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%) Rasio rumah layak huni	100 % 19.24 % 19.24 % 19.24 % 100 % 100 %			18.94 % 18.64 %	862.559.350,00				20.47 % 19.24 % 19.24 % 19.24 % 20.47 % 20.47 %	14.342.823.87 5,00
	1.04.03. 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	4 Dokumen			4 dokumen	52.873.500,00			Masyarakat Luwu Timur	4 Dokumen	110.148.750,0 0
	1.04.03. 2.01.00 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman											
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4 Laporan			4 Laporan	52.873.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Luwu Timur	4 Laporan	110.148.750,0 0

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.04.03. 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	17,4 Ha			4 dokumen 4 Dokumen	18.035.000,00			Masyarkat Kab. Luwu Timur	17,4 Ha	380.000.000,0 0
	1.04.03. 2.02.00 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP											
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalis asi	4 Dokumen			1 Dokumen	18.035.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarkat Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	190.000.000,0 0
	1.04.03. 2.02.00 14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh											
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	3 Dokumen			4 Dokumen	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarkat Kab. Luwu Timur	3 Dokumen	190.000.000,0 0

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.04.03. 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, Luas penangananan infrastruktur kawasan kumuh Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah sepuluh; Terlaksan anya penangananan infrastruktur kawasan kumuh Luas penangananan infrastruktur kawasan kumuh	70,62 Persen			65,62 % 65,62-16,10 %ha 65,62-16,1 %ha 16,1 Ha	791.650.850,00			Masyarakat Kab. Luwu Timur	70,62 Persen	13.852.675,12 5,00
	1.04.03. 2.03.00 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni											
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	200 Unit Rumah			600 Unit Rumah	61.850.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	200 Unit Rumah	126.987.625,0 0
	1.04.03. 2.03.00 13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh											

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar</i>	10 Ha			5 Ha	729.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	10 Ha	13.725.687.50 0,00
4	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<i>Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU</i>	19.30 %			19.30 %	9.145.500.000,00				19.30 %	13.725.687.50 0,00
	1.04.05. 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU</i>	12 lingkunga n			12 lingkungan 12 lingkungan	9.145.500.000,00			Masyarakat Kab. Luwu Timur	12 lingkunga n	13.725.687.50 0,00
	1.04.05. 2.01.00 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian											
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>	12 Lokasi			1 Lokasi	9.145.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	12 Lokasi	13.725.687.50 0,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						275.313.900,00					827.500.000,0 0

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						275.313.900,00					827.500.000,00
1	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %			100 %	5.162.500,00				100 %	35.000.000,00
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terdaftar	5 kasus			5 Kasus	5.162.500,00			Masyarakat Kab. Luwu Timur	5 kasus	35.000.000,00
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara			3 Berita Acara	5.162.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masyarakat Kab. Luwu Timur	5 Berita Acara	35.000.000,00
2	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan	100 %			100 %	10.426.000,00				100 %	225.000.000,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.10.05. 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n	700000 m2			100000 m2	10.426.000,00			Penerima Manfaat Aset Tanah Pemda	500000 m2	225.000.000,0 0
	2.10.05. 2.01.00 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2 Dokumen				10.426.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Penerima Manfaat Aset Tanah Pemda	2 Dokumen	225.000.000,0 0
3	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda	100 %			100 %	90.865.400,00				100 %	130.000.000,0 0
	2.10.08. 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi	15 bidang			15 Bidang	90.865.400,00			Penerima Manfaat Aset Tanah Pemda	15 bidang	130.000.000,0 0
	2.10.08. 2.02.00 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong											
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	4 Laporan			5 Laporan	90.865.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Penerima Manfaat Aset Tanah Pemda	4 Laporan	130.000.000,0 0

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	<i>persentase izin lokasi</i>	100 %			100 %	5.080.000,00				100 %	12.500.000,00
	2.10.09. 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	<i>Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar</i>	3 izin			3 izin	5.080.000,00			Penerima Manfaat Tanah Aset Pemda	3 izin	12.500.000,00
	2.10.09. 2.01.00 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara											
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>	3 Dokumen			2 Dokumen	5.080.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Penerima Manfaat Tanah Aset Pemda	3 Dokumen	12.500.000,00
5	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	<i>Persentase luas lahan bersertifikat</i>	40.35 %			40.35 %	163.780.000,00				40.35 %	425.000.000,0 0
	2.10.10. 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi</i>	100 persen			100 %	163.780.000,00			Penerima Manfaat Tanah Aset Pemda	100 persen	425.000.000,0 0
	2.10.10. 2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4 Dokumen			10 Dokumen	163.780.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Penerima Manfaat Tanah Aset Pemda	4 Dokumen	425.000.000,0 0

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
J U M L A H								17.060.801.700,00					36.081.265.801,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Rencana Anggaran pada APBD-P 2024 untuk Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 17.060.801.700,00

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD).

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk mencapai target kinerja yang belum tercapai di tahun sebelumnya dan mempertahankan kinerja yang sudah tercapai.

Rencana Kerja ini dibuat agar seluruh jajaran Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dapat menghayati pada Dinas Perumahan Kawasan dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Penyusunan Renja Tahun 2024 ini akan lebih dapat dirasakan manfaatnya apabila dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini memerlukan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait, khususnya ASN pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan demi tercapainya sasaran yang diinginkan. Keberhasilan yang sudah tertuang dalam renja ini tidak terlepas dari sinergitas, kerjasama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat. Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin

Malili, Juni 2024

KEPALA DPKPP



XANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197403232003121004